

INFORMASI APBN 2021

PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
DAN PENGUATAN REFORMASI



REPUBLIK INDONESIA

#UANGKITA



Informasi
APBN 2021

PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
DAN PENGUATAN REFORMASI

Disusun oleh
Tim Kementerian Keuangan

Editor:
Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran

Ide & Konsep
Kandha Aditya Sandjoyo **Desain Cover**
M. Fitrah

Kata Pengantar



Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2021 telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 26 Oktober 2020.

Di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Untuk itu APBN 2021 mengambil tema **“Percepatan Pemulihian Ekonomi dan Penguatan Reformasi”**.

APBN 2021 menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal. APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Pemulihan ekonomi tahun 2021 secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya. Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu fokus utama untuk mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat sangat cepat dipicu oleh pandemi ini.

Dengan semangat mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel, buku Informasi APBN 2021 ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan bentuk transparansi Pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan hingga buku Informasi APBN 2021 yang dikemas sederhana tetapi sarat informasi ini dapat terbit. Besar harapan kami buku ini dapat memberikan pencerahan mengenai APBN 2021 dan arah kebijakan pembangunan Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI



Daftar

Isi.

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii

Siklus Penyusunan APBN 2021.....	1
Percepatan Pemulihan Ekonomi & Penguatan Reformasi	2
Ringkasan APBN 2021	3
Outlook Pertumbuhan Ekonomi Global	4
Asumsi Dasar Ekonomi Makro	5
Sasaran dan Indikator Pembangunan.....	6
Postur APBN	7

PENDAPATAN 8 NEGARA

Penerimaan Perpajakan.....	9
PNBP	13

BELANJA 15 NEGARA

Belanja Pemerintah	16
BPP Menurut Fungsi	17
Belanja K/L.....	18
Belanja Tematik.....	20
Subsidi	32
Transfer ke Daerah & Dana Desa	33
Peta Dana Alokasi Umum.....	34
DAK Fisik	35
DAK Nonfisik.....	36
Dana Desa	37

DEFISIT & PEMBIAYAAN 38 ANGGARAN

Pembiayaan Utang	40
Pembiayaan Investasi.....	41

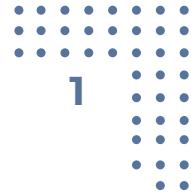
Disclaimer

Data yang digunakan pada buku ini:
2016-2019 : LKPP Audited
2020 : Peraturan Presiden Nomor 72/2020
2021 : UU No 9/2020 ttg APBN 2021

APBN 2021

PERCEPATAN
PEMULIHAN
EKONOMI
DAN PENGUATAN
REFORMASI





Siklus Penyusunan APBN 2021

Januari 2020

Presiden menetapkan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan nasional



Proses penyusunan APBN 2021 dilakukan di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk memberi fleksibilitas pada Pemerintah.

APBN 2021 disahkan pada awal Oktober untuk memberi waktu yang cukup pada Pemerintah dalam menyelesaikan DIPA

Percepatan Pemulihan Ekonomi Penguatan & Reformasi



Kesehatan

Penanganan Covid-19 dan pemulihian kesehatan masyarakat merupakan prasyarat pemulihian ekonomi dan pelaksanaan reformasi. Langkah yang akan ditempuh Pemerintah adalah penyediaan vaksin guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

Sementara itu, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dari sisi sumber daya kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta pembangunan sistem kesiapsiagaan ketahanan kesehatan untuk membentengi dari kondisi darurat kesehatan di masa depan terus dilakukan.



Ekonomi

Strategi ditempuh untuk pemulihian ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut antara lain dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak (a.l. Pangan, Pariwisata), serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR serta melanjutkan program perlindungan sosial yang dilakukan secara terarah dan terukur, sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian di tengah potensi ketidakpastian yang tinggi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat



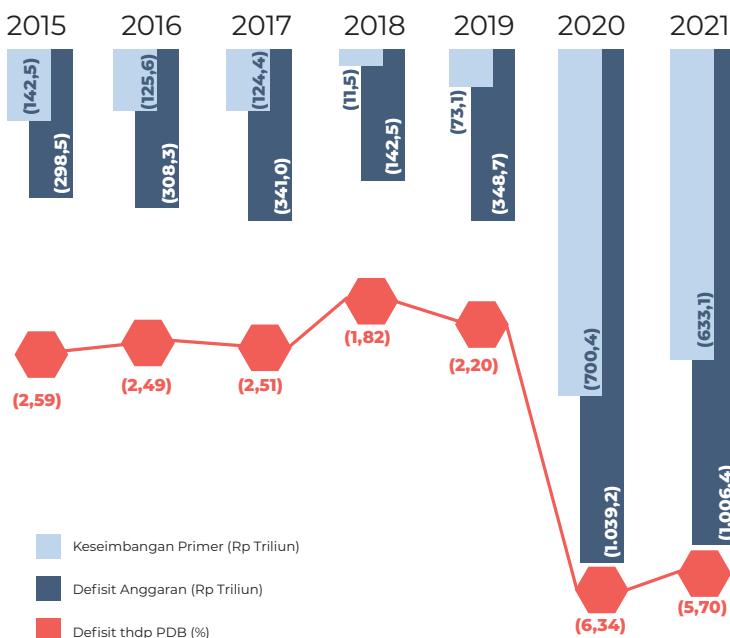
Reformasi

Diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk membangun fondasi yang kuat dalam rangka pemulihian ekonomi dan keluar dari *middle income trap*.

Reformasi menjadi penting karena merupakan prasyarat dalam upaya peningkatan iklim investasi yang dibutuhkan untuk memulihkan pertumbuhan, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing (*competitiveness*). Antara lain melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihian ekonomi nasional serta redesign sistem penganggaran

Ringkasan APBN 2021

Kebijakan *countercyclical* masih diperlukan untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian Covid-19



**Defisit APBN 2021
pada kisaran
5,70% PDB**

Pendapatan Negara

- ✓ Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur
- ✓ Melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
- ✓ Meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat

Belanja Negara

- ✓ Melanjutkan penanganan kesehatan akibat Covid-19, utamanya peningkatan *supply side* dan antisipasi pengadaan vaksin
- ✓ Melanjutkan program perlinsos untuk akselerasi pemulihan (a.l. Kartu Sembako, PKH, Pra kerja)
- ✓ Dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak (a.l. Pangan, Pariwisata), serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR

Pembiayaan Anggaran

- ✓ Mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF)
- ✓ Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- ✓ Melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan

Outlook Pertumbuhan Ekonomi Global

Memburuk akibat pandemi, namun pemulihan ekonomi yang lebih cepat di beberapa wilayah daripada estimasi awal mendorong dilakukannya revisi ke atas

outlook, y-o-y (%)

	IMF		OECD		World Bank			
	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
Jan	3,3	3,4	Mar	3,3	3,4	Jan	2,5	2,6
Apr	-3,0	5,8						
Jun	-4,9	5,4	Jun	-7,6 s.d. -6,0	2,8 s.d. 5,2	Jun	-5,2	4,2
Okt	-4,4	5,2	Sep	-4,5	5,0			



Outlook pertumbuhan ekonomi global 2020 lebih baik khususnya karena kenaikan outlook Tiongkok (pertumbuhan kembali positif sejak Q2) dan outlook AS yang dianggap telah *quick rebound* dibanding estimasi sebelumnya.



Outlook pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang sedikit mengalami penurunan di tengah eskalasi Covid-19 yang masih terjadi, serta kontraksi di negara besar seperti India

Risiko yang memengaruhi outlook ke depan



Eskalasi Covid-19



Ketersediaan vaksin



Tensi geopolitik internasional, termasuk AS-Tiongkok

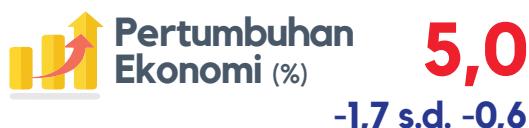


Efektivitas stimulus

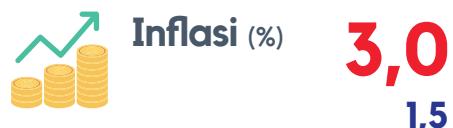
Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali menuju *trajectory* pertumbuhan jangka menengah, meskipun masih penuh ketidakpastian

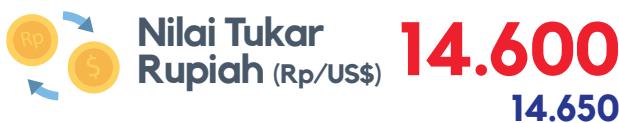
2021 Outlook 2020
proyeksi per Oktober 2020



Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penanganan Covid-19, dukungan stimulus fiskal untuk melanjutkan program PEN dalam rangka pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi global



Tingkat inflasi tahun 2021 dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.



Pemulihan ekonomi domestik di tahun 2021 akan semakin menarik arus modal masuk dan memperkuat Rupiah. Peluang pemulihan ekonomi negara maju, akan memengaruhi kondisi likuiditas di pasar global



Tingkat bunga SBN 10 tahun akan dipengaruhi antara lain oleh risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek membaiknya perekonomian Indonesia. Kerja sama otoritas fiskal dan moneter akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.



Faktor yang memengaruhi harga minyak dunia 2021 antara lain peluang perbaikan kondisi perekonomian global berdampak pada naiknya permintaan minyak di pasar komoditas minyak mentah global



Target *lifting* migas tahun 2021 akan dipengaruhi oleh potensi penurunan alamiah sumur-sumur *existing* dan optimalisasi *lifting* migas melalui peningkatan upaya teknis, reformasi birokrasi, serta perbaikan iklim usaha (*ease of doing business*)

Sasaran dan Indikator Pembangunan

Upaya meningkatkan kesejahteraan a.l ditunjukkan dengan kesepakatan untuk memperbaiki indeks Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dalam APBN 2021



Tingkat Pengangguran (%)
2021: 7,7 – 9,1



Indeks Pembangunan Manusia
2021: 72,78 – 72,95



2021: 0,377 – 0,379



Kemiskinan (%)
2021: 9,2 – 9,7



Nilai Tukar Petani
2021: 102-104



Nilai Tukar Nelayan
2021: 102-104

Postur APBN

Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

APBN 2021

(triliun Rupiah)

Defisit 5,7%
terhadap PDB

2020 2021

Pendapatan Negara

1.699,9	1.743,6
1.404,5	1.444,5
294,1	298,2
1,3	0,9

Belanja Negara

2.739,2	2.750,0
1.975,2	1.954,5
763,9	795,5

Keseimbangan Primer

(700,4) (633,1)

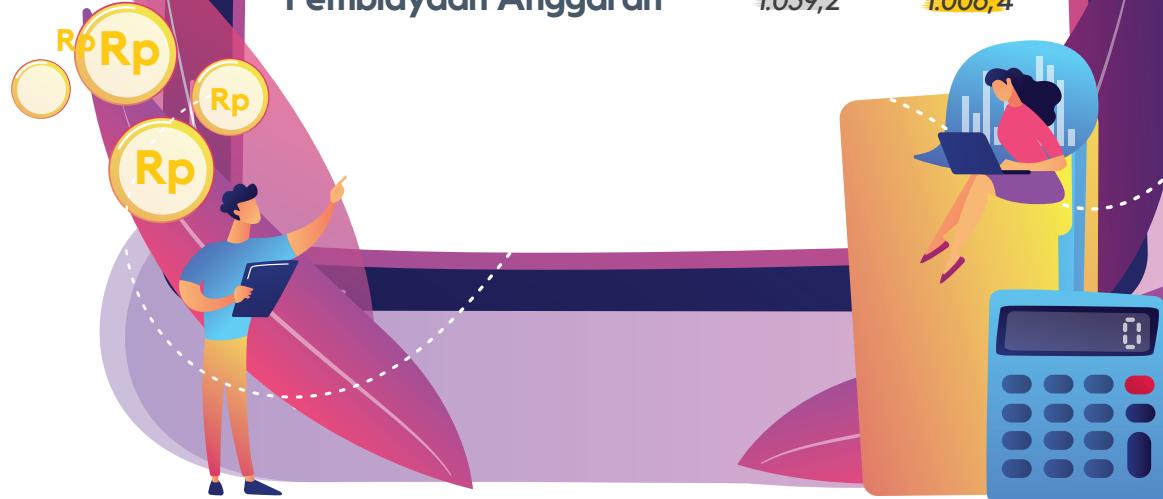
Defisit Anggaran

(1.039,2)
(6,34) % thdp PDB

(1.006,4)
(5,70) % thdp PDB

Pembentukan Anggaran

1.039,2 1.006,4



APBN 2021

Pendapatan Negara

Rp1.743,6 T

Tumbuh
2,6%

Penerimaan Perpajakan
Rp1.444,5 T

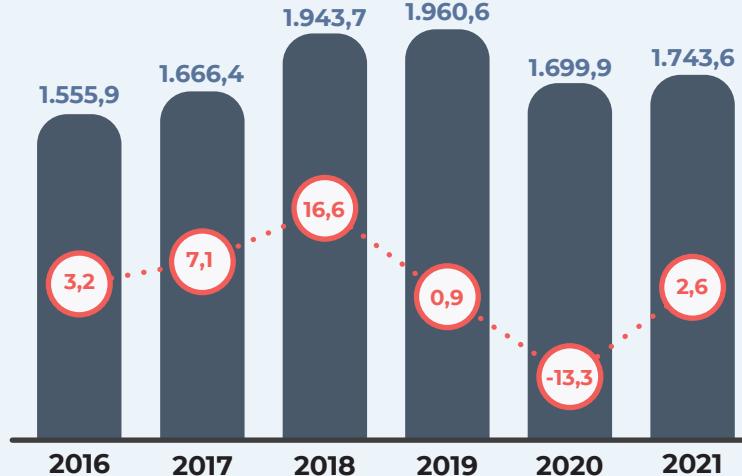
Hibah
Rp0,9 T

PNBP
Rp298,2 T

Kebijakan pendapatan negara untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan reformasi di perpajakan dan PNBP.

Pendapatan Negara
2016-2021
(triliun rupiah)

● Pertumbuhan (persen)



Penerimaan Perpajakan

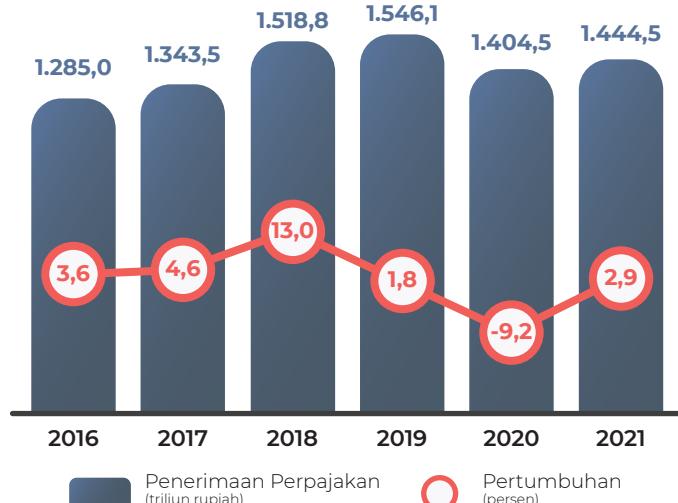
Penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 2,9% dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi

Penerimaan Perpajakan 2016-2021

Periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat

Tahun 2020, perpajakan diperkirakan terkontraksi 9,2% sebagai dampak pandemi Covid-19.

Tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi.



Perpajakan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, a.l:
 - Pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang untuk Peningkatan kualitas SDM
- Penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi
 - Dukungan perpajakan dan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT
 - Mengembangkan layanan Kepabeanan dan Cukai berbasis digital

Optimalisasi dan Reformasi Perpajakan

- Mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak
- Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan
- Meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang pelayanan organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak
- Melakukan ekstensifikasi barang kena cukai

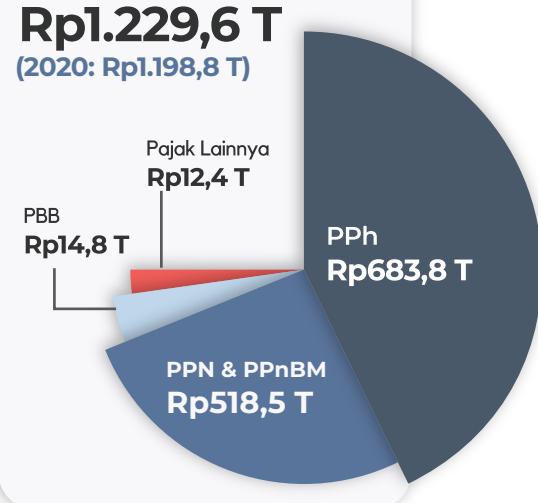
Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak tumbuh 2,6% dengan mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi serta mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur.

Penerimaan Pajak, 2016-2021



**Target Pajak 2021
Rp1.229,6 T
(2020: Rp1.198,8 T)**



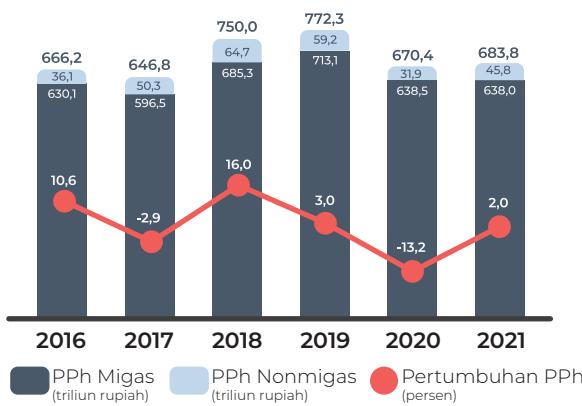
✓ Periode 2016-2019, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4% antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekonomi dan harga komoditas utama. Pada tahun 2020 penerimaan pajak terkontraksi dampak dari perlambatan ekonomi dan pemberian insentif dampak pandemi Covid-19.

✓ Tahun 2021, penerimaan pajak akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi secara lebih terukur dan diproyeksikan tumbuh positif sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian dan dukungan kelanjutan reformasi administrasi pajak.

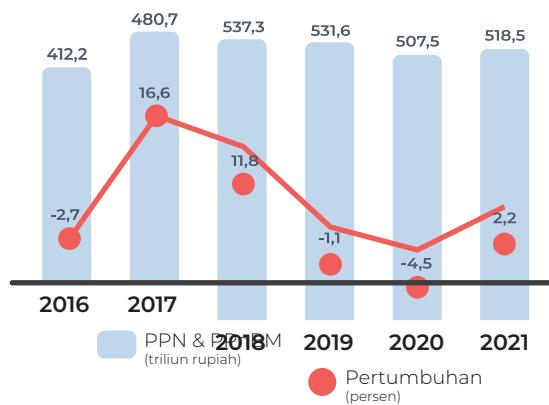
Penerimaan Pajak

Pada tahun 2021 akan didukung oleh kinerja positif penerimaan PPh serta PPN & PPnBM yang diproyeksikan meningkat sejalan dengan prospek membaiknya aktivitas ekonomi

PPh, 2016-2021



PPN & PPnBM, 2016-2021



- ✓ Penerimaan PPh tumbuh rata-rata sebesar 5,0% dalam periode 2016-2019 seiring dengan peningkatan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Pada tahun 2020, terkontraksi 13,2% akibat penurunan ekonomi dan pemberian insentif fiskal pandemi Covid-19.
- ✓ Pada tahun 2021, diperkirakan tumbuh 2,0% terutama karena pulihnya harga komoditas.

- ✓ Dalam periode 2016-2019, PPN dan PPnBM tumbuh rata-rata sebesar 8,8% per tahun. Pada tahun 2020, PPN dan PPnBM diperkirakan akan terkontraksi akibat penurunan aktivitas ekonomi dan kebijakan insentif percepatan pengembalian PPN untuk membantu likuiditas dunia usaha dampak pandemi Covid-19.
- ✓ Pada APBN tahun 2021, PPN dan PPnBM diproyeksikan meningkat sejalan membaiknya prospek perekonomian, perbaikan administrasi pajak, dan implementasi pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PSME)

Insentif Pajak

sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi

Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN

membantu cashflow perusahaan untuk kembali melakukan aktivitas usaha

Insentif PPh 22 Impor

dalam rangka memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

mendukung daya saing dan keekonomian sektor tertentu

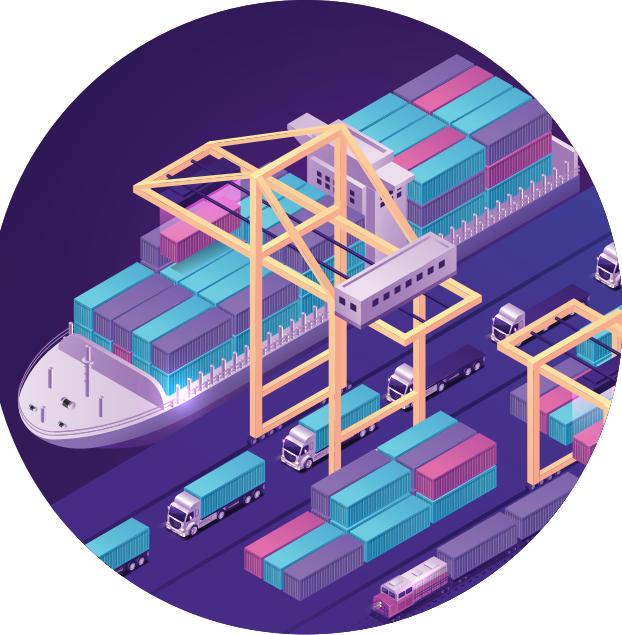
Tax Holiday & Tax Allowance

menarik penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri dalam rangka mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan wilayah

Informasi APBN 2021

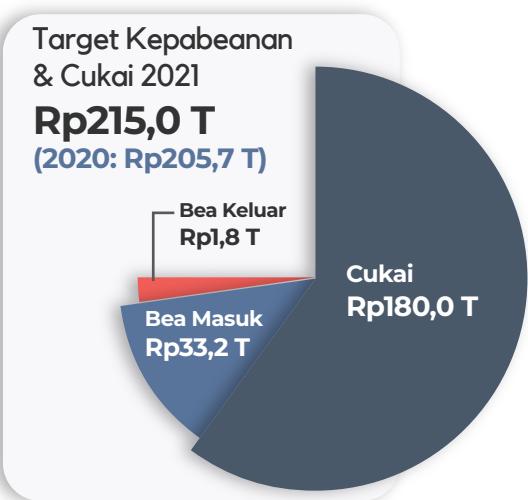
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi





Kepabeaan dan Cukai

Penerimaan kepabeaan dan cukai tahun 2021 diproyeksikan meningkat 4,5% seiring dengan kondisi perekonomian domestik yang mulai membaik serta menggeliatnya perekonomian global.



Kebijakan

Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional

Insentif kepabeaan terutama untuk kemudahan ekspor dan impor memenuhi kebutuhan bahan baku lokal dan relaksasi bagi Kawasan Berikat (KB) & Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Penataan Ekosistem Logistik Nasional

dengan target a.l:

- Menurunkan biaya logistik
- Menurunkan waktu logistik
- Peringkat *Trading Across Border* (TAB) dalam EODB naik dari 116 ke 87

Dukungan Transformasi Ekonomi

- Pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*)
- Pengembangan *Smart Customs* dan *Excise System*

Cukai, 2016-2021



Bea Masuk, 2016-2021



Bea Keluar, 2016-2021



✓ Periode 2016 – 2019, cukai tumbuh rata-rata sebesar 6,3% per tahun seiring dengan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai ilegal.

✓ Tahun 2020, diperkirakan terkontraksi 0,1% akibat penurunan konsumsi dampak pandemi Covid-19.

✓ Tahun 2021, penerimaan cukai diperkirakan tumbuh 4,5% seiring dengan penertiban peredaran barang kena cukai ilegal serta ekstensifikasi barang kena cukai baru

✓ Tahun 2016-2019 tumbuh rata-rata 4,9% per tahun sejalan dengan peningkatan kelancaran arus lalu lintas barang.

✓ Tahun 2020 diperkirakan terkontraksi sebesar 15,2% akibat penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pemberian insentif fiskal penanganan pandemi Covid-19.

✓ Tahun 2021, bea masuk diproyeksikan tumbuh 4,2% seiring peningkatan aktivitas impor

✓ Periode 2016 - 2019, bea keluar tumbuh rata-rata 5,6% per tahun terutama karena peningkatan ekspor hasil tambang.

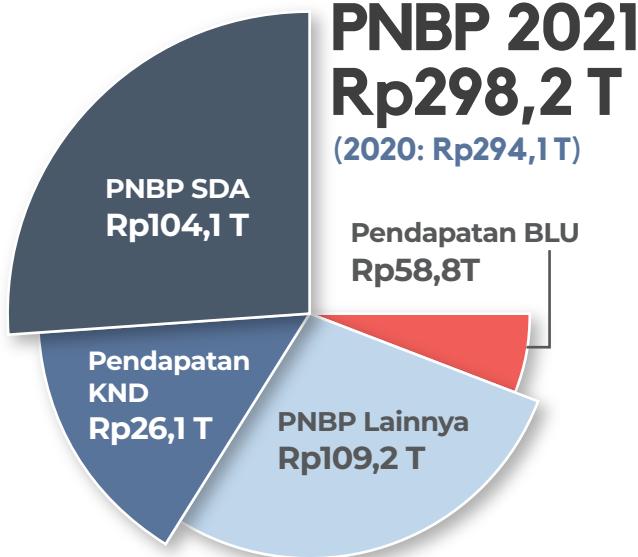
✓ Tahun 2020, bea keluar diperkirakan terkontraksi 53,1% seiring dengan penurunan ekspor komoditas tertentu dan pemberian insentif fiskal.

✓ Bea keluar Tahun 2021, ditargetkan tumbuh 8,1% sejalan dengan pulihnya ekonomi global dan tren kenaikan harga komoditas unggulan.



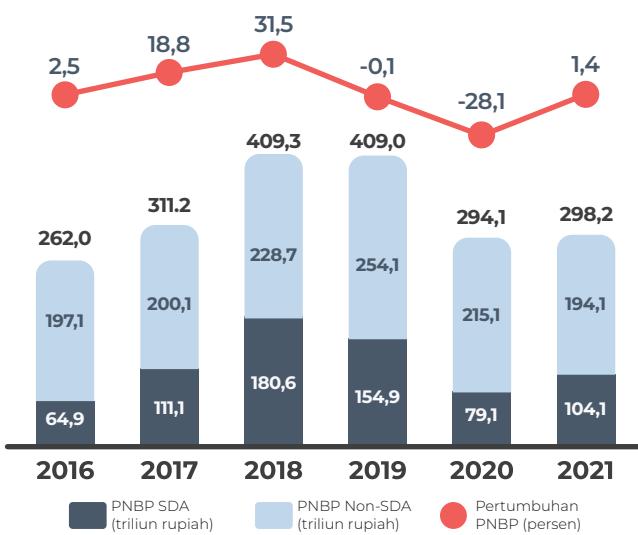
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Diproyeksikan meningkat seiring dengan peningkatan harga komoditas terutama minyak bumi dan optimalisasi PNBP berbasis pelayanan



Kebijakan

- ✓ Penyempurnaan regulasi PNBP
- ✓ Optimalisasi *Lifting* Migas melalui peningkatan iklim investasi sektor migas dan mengendalikan Cost recovery
- ✓ Optimalisasi Penerimaan Deviden dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko serta efisiensi kinerja BUMN
- ✓ Insentif PNBP dengan pemberian tarif s.d Rp0 atau 0%
- ✓ Peningkatan layanan baik pada K/L dan BLU



Perkembangan PNBP

Dalam periode 2016-2019, PNBP tumbuh rata-rata 13,2% tiap tahunnya. Pertumbuhan PNBP terutama dipengaruhi oleh tren harga komoditas dunia.

Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, PNBP mengalami kontraksi sebesar 28,1%.

Dalam APBN 2021, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi, PNBP diharapkan dapat tumbuh sebesar 1,4% mencapai Rp298,2T



Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP tahun 2021 diproyeksikan sejalan dengan harga komoditas utama khususnya minyak bumi dan dengan layanan PNBP K/L



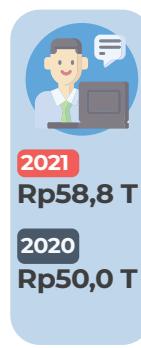
PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dari migas mengikuti pergerakan harga dan *lifting* minyak dan gas bumi, sementara PNBP SDA Nonmigas terutama akan dipengaruhi harga dan produksi batu bara



Optimalisasi penerimaan dividen dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko serta efisiensi kinerja BUMN.



Pelayanan PNBP K/L pada tahun 2021 diharapkan lebih optimal sejalan dengan pulihnya aktivitas perekonomian

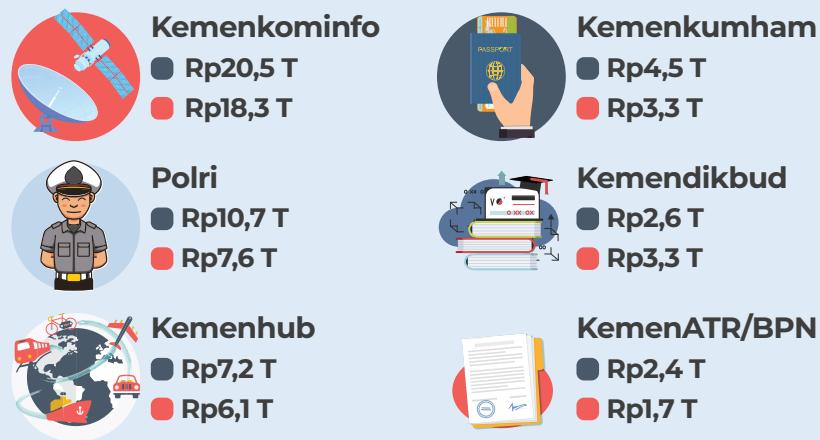


Peningkatan kinerja pelayanan BLU dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*.

PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar

■ 2021 ■ 2020

PNBP Lainnya yang bersumber dari layanan K/L, pada tahun 2021 diharapkan lebih optimal sejalan dengan pulihnya aktivitas perekonomian



APBN 2021

Belanja Negara

Rp2.750,0 T

Tumbuh
0,4%

Didorong untuk lebih optimal dengan pendekatan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*)

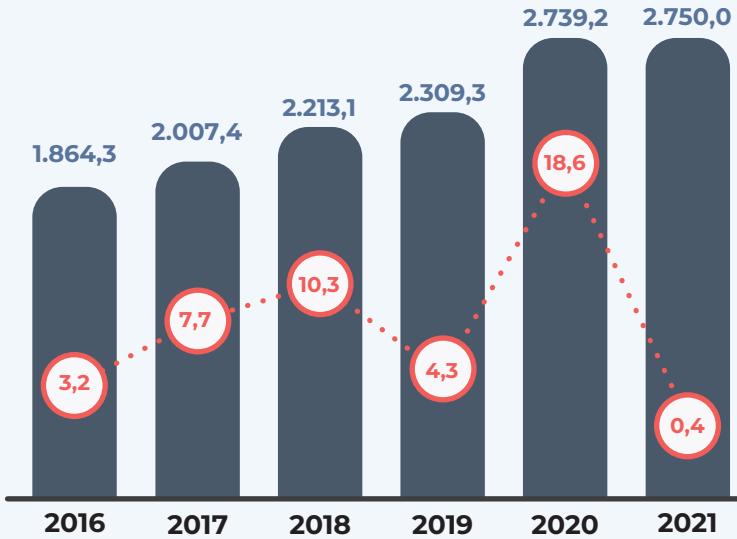
Belanja Pemerintah Pusat
Rp1.954,5 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp795,5 T

Belanja Negara, 2016-2021

(triliun rupiah)

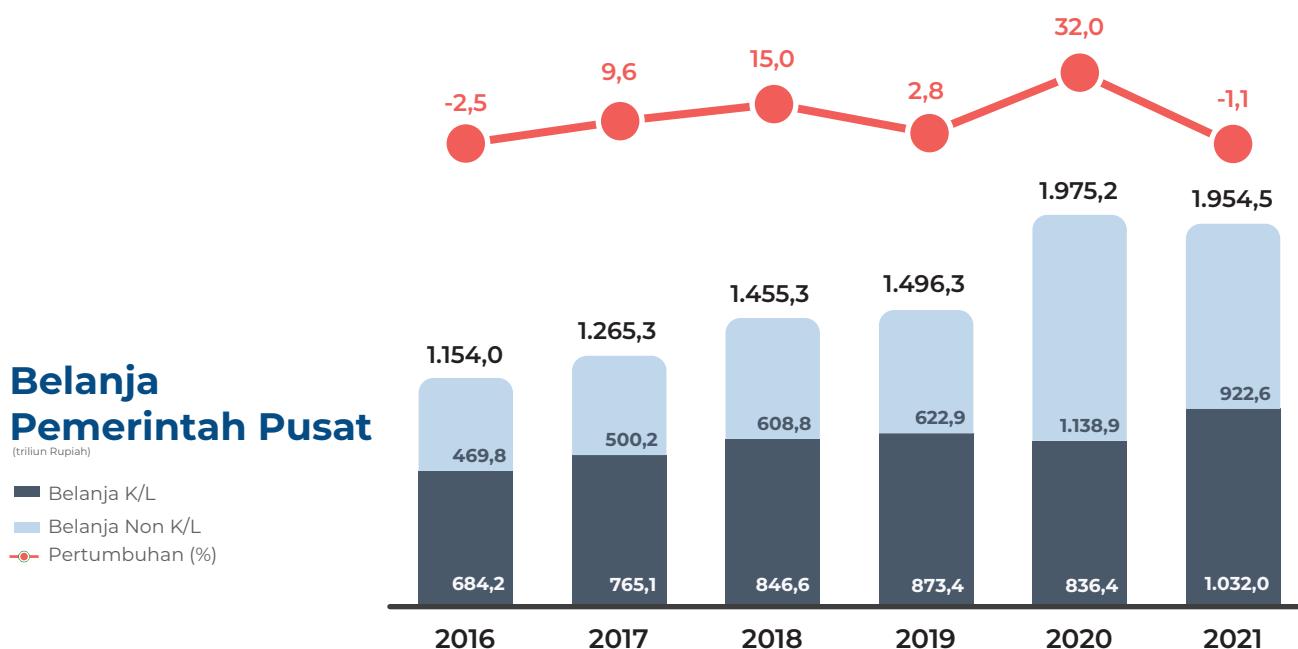
Pertumbuhan (persen)



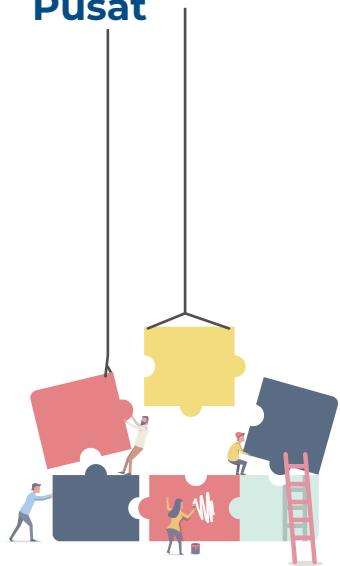


Belanja Pemerintah Pusat

Diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pascapandemi Covid-19, serta penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap*



Fokus Belanja Pemerintah Pusat



Efisiensi belanja, melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja

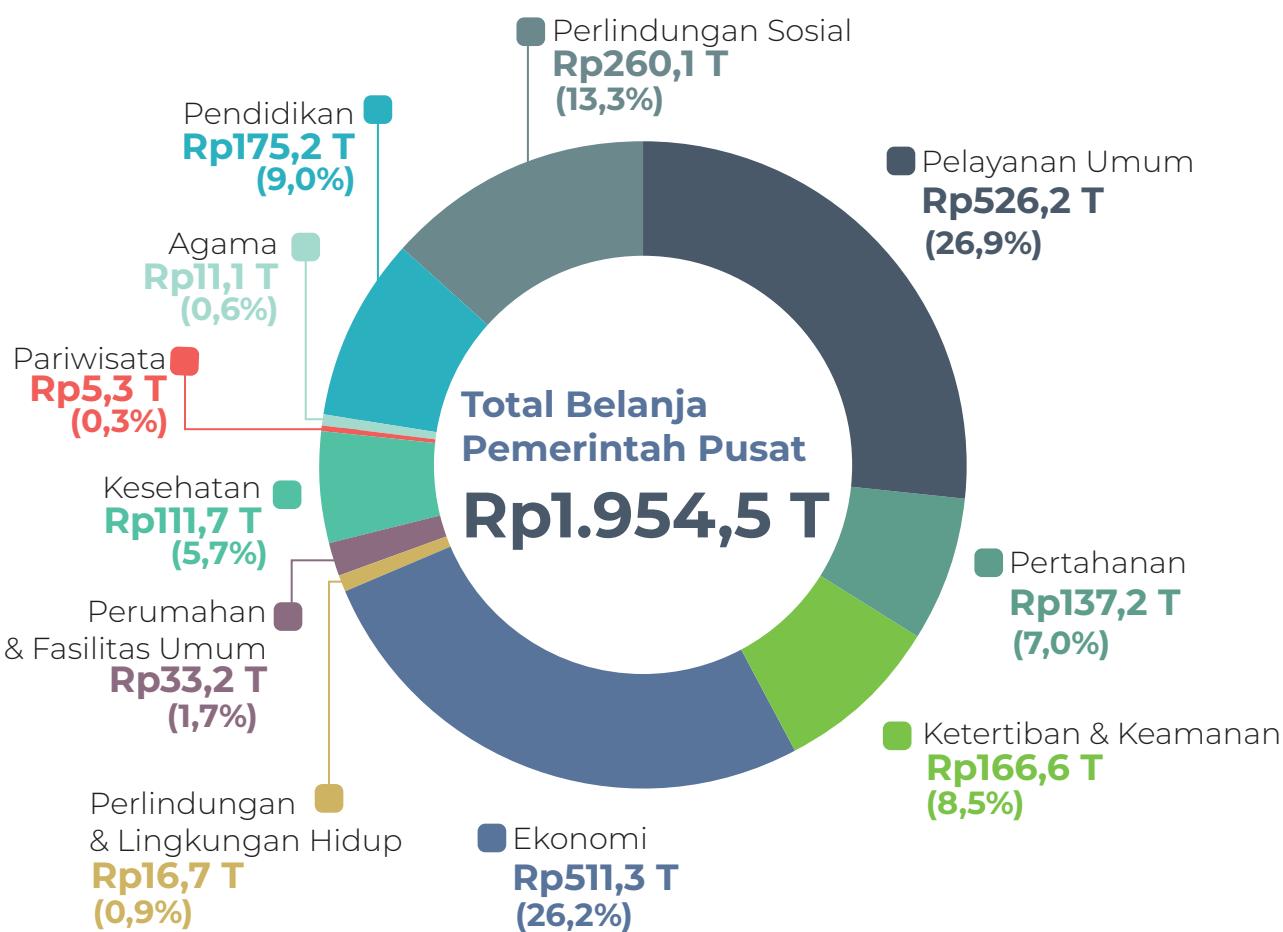
Optimalisasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*)

Mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi

Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, serta penajaman rumusan program

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Komposisi menurut klasifikasi fungsi dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan Pemerintah, dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Pusat



26,9%

Fungsi pelayanan umum
sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong birokrasi serta layanan publik yang lebih tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif, termasuk pemenuhan kewajiban Pemerintah

26,2%

Fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan teknologi dan informatika.

13,3%

Fungsi perlindungan sosial difokuskan untuk membantu masyarakat bawah terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlanjut ke tahun 2021.



Belanja Kementerian/Lembaga

mendukung kelanjutan upaya pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat



**Belanja K/L
Tumbuh 23,4%
dari 2020**

Belanja K/L
(trilliun rupiah)

Pertumbuhan
(persen)

Mendukung terciptanya SDM Aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi

- ✓ mendorong birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi
- ✓ menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian gaji ke-13 dan THR
- ✓ pengendalian jumlah pegawai seiring perubahan pola kerja & proses bisnis

Penguatan Bantuan Sosial

- ✓ melanjutkan pemberian bantuan program PKH dan Kartu Sembako
- ✓ melakukan perluasan target KIP kuliah
- ✓ memberi bantuan premi PBI JKN
- ✓ memberikan bansos tunai (BST) kepada 10 juta KPM

Dukungan belanja modal untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi

- ✓ melanjutkan kegiatan prioritas tertunda (dampak pandemi Covid-19) secara sangat selektif
- ✓ pendanaan untuk proyek-proyek *multiyears*
- ✓ mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi
- ✓ mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah
- ✓ pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan

Penajaman Belanja Barang dan melanjutkan efisiensi

- ✓ Melanjutkan efisiensi belanja barang, a.l.:
 - Pengendalian perjalanan dinas, rapat-rapat, honor, dan rapat dalam kantor
 - Kebijakan inovatif seperti penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel/bekerja dari rumah, ruang kerja terbuka dan dukungan teknologi informasi untuk penghematan belanja barang
- ✓ Penajaman dan sinergi antara Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda sejalan dengan sumber pendanaan lain maupun peningkatan bantuan sosial.



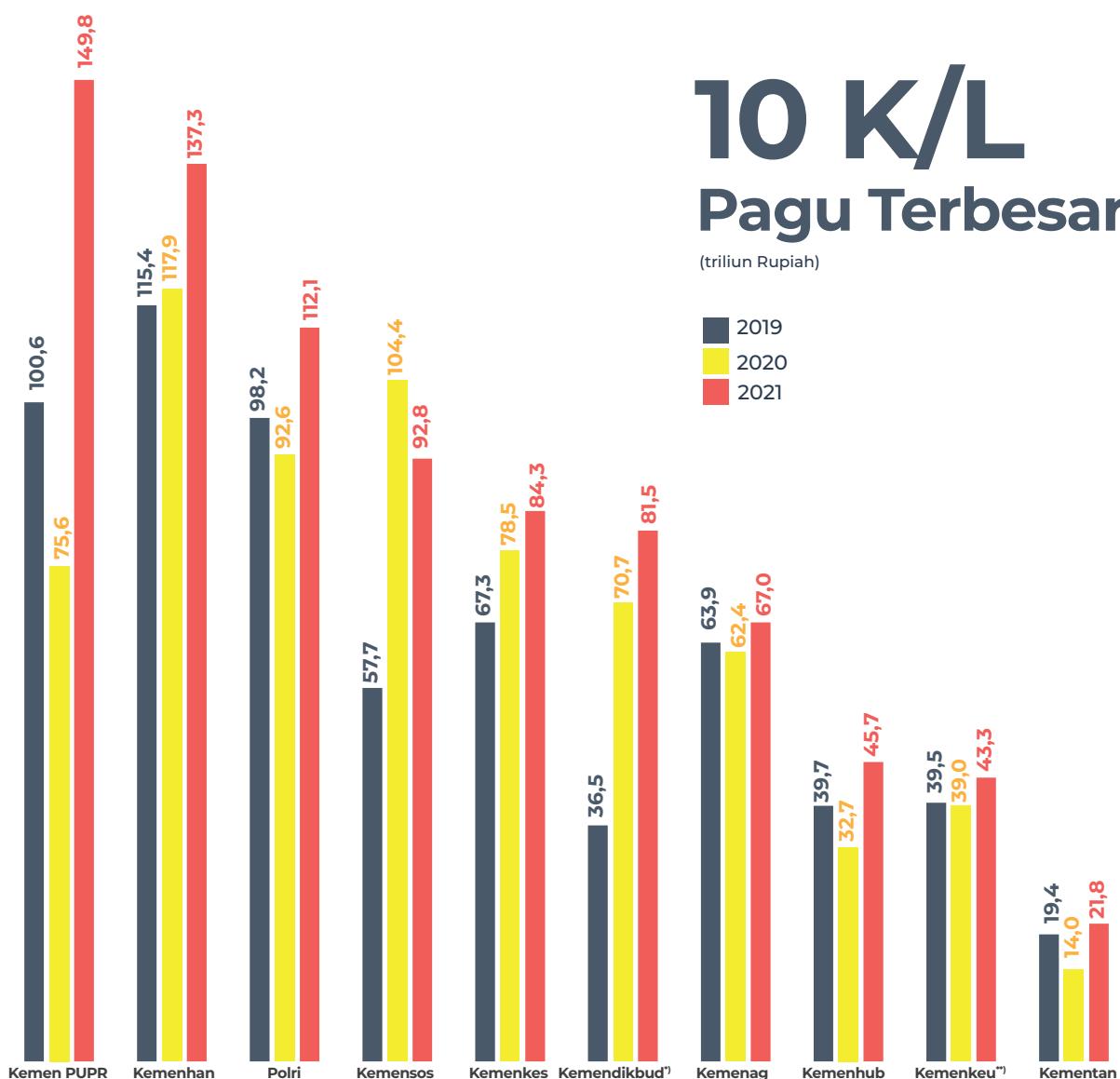
Belanja Kementerian/Lembaga

Diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja

10 K/L Pagu Terbesar

(triliun Rupiah)

- 2019
- 2020
- 2021



^{a)} pengalihan pendidikan tinggi dari Kemenristek ke Kemendikbud

^{b)} termasuk anggaran BLU di Kemenkeu (thn 2019: Rp13,8T; Thn 2020: Rp15,2T; Thn 2021: Rp8,5 T) antara lain BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan LPDP



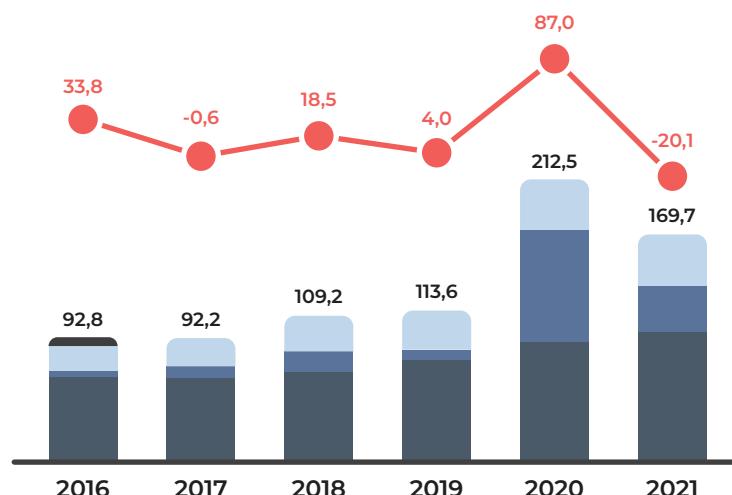
Anggaran Kesehatan

Diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan

Anggaran Kesehatan 2016-2021

(triliun rupiah)

- Belanja K/L
- Belanja Non-K/L
- TKDD
- Pembiayaan
- Pertumbuhan (persen)



Kebijakan



Health Security Preparedness

- Penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit
- Sistem kesehatan terintegrasi

Percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19

- Peningkatan dan pemerataan *supply side*
- Penguatan koordinasi pusat, daerah, swasta
- Antisipasi untuk pengadaan vaksin

Penguatan Sinergi dan Koordinasi Pusat dan Daerah

Sinergi perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan untuk mendukung *supply side*

Penguatan program generasi unggul

- Akselerasi penurunan *stunting*
- Penguatan program promotif-preventif

Reformasi JKN

- Perbaikan mutu layanan dan efektivitas biaya JKN
- Penyesuaian iuran JKN dan validitas data PBI JKN
- Penguatan peran Pemda

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional



1. Penguatan puskesmas
2. Peningkatan rumah sakit dan layanan kesehatan khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK)
3. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan
4. Penguatan ketahanan kesehatan (*health security*)
5. Peningkatan pengendalian penyakit dan imunisasi
6. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan
7. Pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
8. Penguatan pembiayaan kesehatan

Informasi APBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Anggaran Kesehatan

Diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan

Target Prioritas Bidang Kesehatan

Untuk penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional

 Antisipasi pengadaan Vaksin Covid-19
160 juta orang
Rp18,0 T

 Antisipasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
160 juta orang
Rp3,7 T

 Sarpras, lab, litbang, PCR
Kemenkes Rp1,2 T
BPOM Rp0,1 T

 Bantuan luran JKN bagi **PBPU dan BP kelas III**
Rp2,4 T

 Bantuan luran Peserta PBI JKN
96,8 juta jiwa
Rp48,8 T

 Penguatan intervensi penanganan *stunting*
360 kabupaten/kota

 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Nusantara Sehat)
8.943 orang

 Layanan Pengendalian Penyakit TB
145 layanan
Rp2,8 T

 Penyediaan obat vaksin perbekes program kesehatan (Obat TB, HIV/AIDs, malaria, ibu & anak, gizi, tropis terabaikan, obat *buffer*, dan vaksin)
24 paket
Rp3,137 T

 Penyediaan Makanan Tambahan bagi
238.000 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis & 441.000 Balita Kurus
Rp1,1 T

 Pembangunan **971 Gedung Puskesmas** & Pembangunan/ Rehabilitasi **559 RS Rujukan**

 Bantuan Operasional Kesehatan
10.143 Puskesmas
Rp10,7 T

 Pelayanan Kesehatan pada **110 RS Kemenhan** dan **52 RS Polri**

 Pemeriksaan **60.340 sampel obat** dan **25.158 sampel makanan**

 Penyediaan alat/obat kontrasepsi
12.246 fasilitas kesehatan



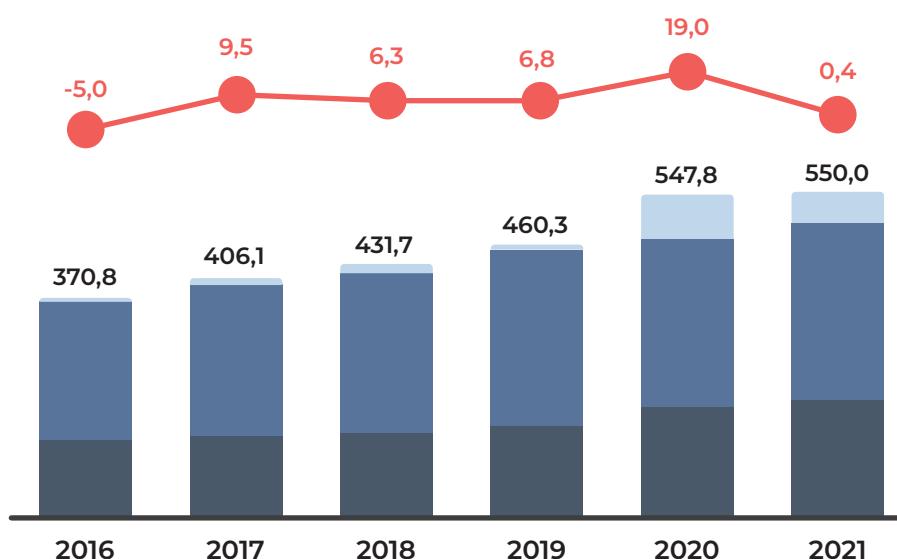
Anggaran Pendidikan

Diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru

Anggaran Pendidikan 2016-2021

(triliun rupiah)

- BPP
- TKDD
- Pembiayaan Anggaran
- Pertumbuhan (persen)



Melalui Belanja Pemerintah Pusat

Rp184,5 T

- ✓ Anggaran Pendidikan melalui K/L (Rp160,5 T), antara lain:
 - Kemendikbud Rp81,5 T, a.I untuk kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, dan organisasi penggerak.
 - Kemenag Rp55,9 T, untuk melanjutkan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia
 - K/L Lainnya Rp23,1 T
- ✓ Anggaran Pendidikan melalui BA BUN (Rp24,1 T)

Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Rp299,1 T

- ✓ DTU Rp156,6 T meliputi anggaran gaji pendidik, non gaji pendidik, serta DBH Tambahan Migas Aceh dan Papua Barat
- ✓ DTK Rp135,1 T, untuk meningkatkan ketersediaan akses, dan mutu layanan pendidikan dan mendukung program merdeka belajar
- ✓ DID Rp1,4 T untuk mendukung digitalisasi pendidikan
- ✓ Dana Otsus Rp6,0 T untuk pembangunan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan pendidikan

Melalui Pembiayaan Anggaran

Rp66,4 T

- ✓ Dialokasikan melalui investasi Pemerintah dalam pos pengeluaran pembiayaan. Dalam APBN tahun 2021, Pemerintah akan melanjutkan pengalokasian investasi di bidang pendidikan antara lain dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi

Informasi APBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi



Anggaran Pendidikan

Diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru

Reformasi Pendidikan



Kebijakan Pendidikan Lainnya



Penguatan vokasi & kartu prakerja
link and match dengan industri, serta penguatan R&D

Percepatan peningkatan kualitas sarpras
 sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T

Penguatan penyelenggaraan PAUD
 melalui BOP PAUD dan DD untuk PAUD di desa

Penajaman KIP Kuliah & penajaman pendidikan tinggi.

Peningkatan efektifitas penyaluran bantuan pendidikan.
 BOS, PIP, dan LPDP



Anggaran Pendidikan

Diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru



Program Indonesia Pintar
(juta jiwa)
Kemendikbud 17,9 **Kemenag 2,2**



Beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah
(ribu mahasiswa)
Kemendikbud 1.108,8 **Kemenag 56,0**



Bantuan Operasional Sekolah
(juta siswa)
TKDD 44,7 **Kemenag 8,9**



TPG Non-PNS
(ribu guru)
Kemendikbud 255,6 **Kemenag 270,9**



Penerimaan Beasiswa LPDP
(mahasiswa)
Kemenkeu 4.000



Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan (unit)

Kemen PUPERA

- Sekolah Dasar & Menengah **1.670**
- Madrasah & Sekolah Keagamaan **189**
- Perguruan Tinggi Negeri **94**
- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri **12**

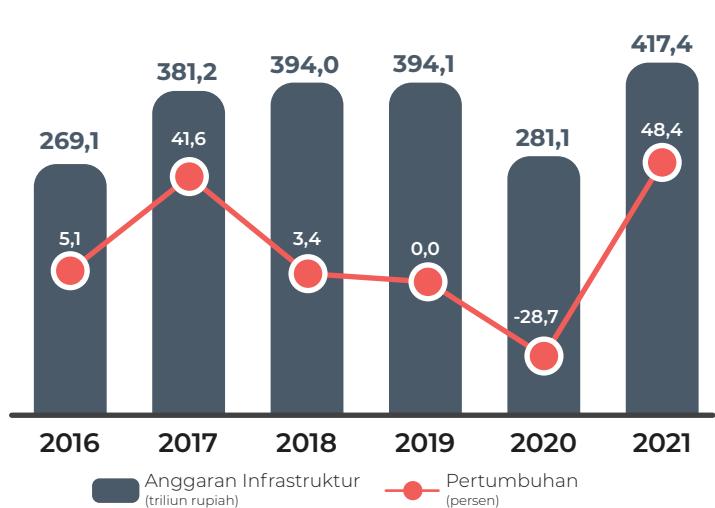
Rencana Pencapaian di bidang Pendidikan





Anggaran Infrastruktur

Diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi



Alokasi 2021 di Bidang Infrastruktur **Rp417,4 T**

Pemerintah Pusat

Rp239,8 T

TKDD

Rp131,8 T

Pembiayaan

Rp45,8 T

Kebijakan



Melanjutkan pembangunan infrastruktur pascapandemi Covid 19 melalui penguatan **infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas**

Diarahkan dalam bentuk **infrastruktur padat karya** yang mendukung kawasan industri dan pariwisata

Pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan **penyediaan kebutuhan dasar** (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional

Penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda

Rencana Pencapaian di bidang Infrastruktur

Pelayanan Dasar

Rumah Susun & Rumah Khusus **10.706 unit**

Bendungan **53 unit (43 on going & 10 baru)**

Jaringan irigasi **Pembangunan 600 km dan Rehabilitasi 3.900 km**

Konektivitas

Pembangunan Jalan **965,4 km**

Jembatan **26,9 km**

Jalur KA **446,56 km'sp**

Bandara **10 unit/lokasi**

Energi dan Ketenagalistrikan

Jaringan Gas Bumi utk Rumah Tangga **120.776 SR**

PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage **11,8 MWp**

Informasi APBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Pembangunan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi

Difokuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan *delivery* layanan kepada masyarakat

Kebijakan

- Akselerasi **Transformasi Digital** untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Mewujudkan **public service delivery** yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan
- Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (**shared services**)
- Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet di desa/kelurahan 3T



Total Anggaran Rp26,0 T

Belanja K/L **Rp17,0 T**

TKDD **Rp9,0 T**

Kegiatan Strategis

- Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di desa di wilayah 3T
- Penyediaan akses internet
- Pembangunan Pusat Data Nasional
- Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, *Digital Technopreneur*
- Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Mendukung digitalisasi pendidikan seperti pengadaan alat TIK dan media pembelajaran

Rencana Pencapaian di Bidang TIK

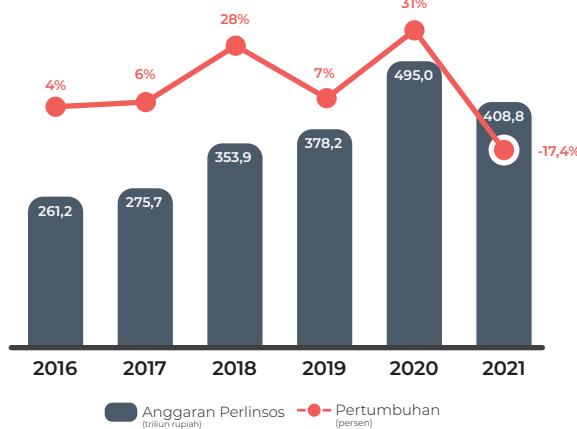
- | | |
|--|---|
| | BTS (di wilayah 3T)
5.053 lokasi |
| | Akses Internet (di wilayah 3 T)
12.377 lokasi (kumulatif) |
| | Palapa Ring
Service Level Agreement (SLA) 95% dan Utilisasi (Barat: 40%, Tengah: 30%, Timur: 30%) |
| | Literasi Digital
295 ribu orang (kumulatif) |
| | Digital Technopreneur
30 Start Up |



Perlindungan Sosial

Sebagai upaya percepatan pemulihan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan

Anggaran Perlinsos 2016-2021



Kebijakan

- Melanjutkan program perlinsos untuk akselerasi pemulihan (antara lain Kartu Sembako, PKH, Bansos Tunai selama 6 bulan, dan Kartu Pra kerja).
- Mendorong program perlinsos yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi penuaan penduduk (*aging population*)
- Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlinsos, serta penguatan *monitoring* dan evaluasi

Reformasi Perlinsos

Sinergi program pemberdayaan

seperti Kewirausahaan Sosial, Usaha Mikro serta program ketenagakerjaan

Integrasi secara bertahap dan berhati-hati program Kartu Sembako

yang lebih berbasis pada target penerima (*beneficiaries*) dengan program subsidi energi yang berbasis komoditas.

Integrasi secara bertahap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)

Rencana Pencapaian di bidang Perlinsos



Jumlah KPM menerima Bantuan PKH **10,0 juta**



Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN **96,8 juta**



Jumlah debitur penerima Subsidi Bunga KUR **29,9 juta**



Jumlah KPM menerima Kartu Sembako **18,8 juta**



Jumlah Siswa Menerima Bantuan PIP **20,1 juta**



Jumlah rumah tangga penerima subsidi listrik **32,8 juta**



Jumlah KPM menerima Bansos Tunai **10,0 juta**



Jumlah Mahasiswa Memperoleh KIP Kuliah **1,2 juta**



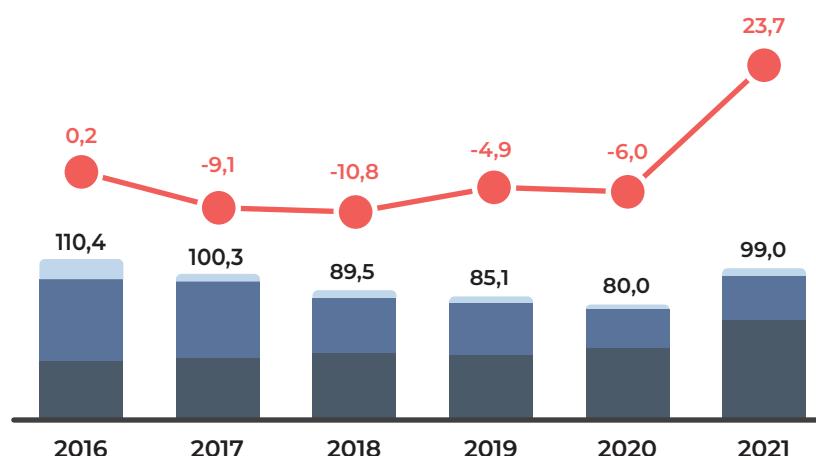
Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan 2021 diarahkan untuk peningkatan produksi pangan serta dukungan pemulihan ekonomi

Anggaran Ketahanan Pangan, 2016-2021

(triliun rupiah)

- Belanja K/L
- Belanja Non-K/L
- TKDD
- Pertumbuhan (persen)



Kebijakan

- ✓ **Mendorong Produksi Komoditas Pangan**
dengan membangun sarpras dan penggunaan teknologi
- ✓ **Revitalisasi Sistem Pangan Nasional**
antara lain dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan

- ✓ **Pengembangan Food Estate**
Di Kalteng, Sumsel, dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan transmigrasi/petani existing dan investasi *small farming* pada lahan seluas 165.000 Ha

Rencana Pencapaian di bidang Ketahanan Pangan

Produksi Padi
54,7
juta ton

Produksi Kedelai
0,3
juta ton

Produksi Tebu
32,6
juta ton

Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3.900 km

Produksi Ikan
8,0
juta ton

Bantuan Premi Asuransi Nelayan
120.000
nelayan

Produksi Jagung
23,9
juta ton

Produksi Daging
4,9
juta ton

Bendungan
43 on going
10 baru

Jaringan Irigasi
600 km

Jaringan Irigasi Air Tanah
100 km

Bantuan Kapal Perikanan
97
unit

Pengembangan Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng
93
unit

Bidang Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata tahun 2021 diarahkan untuk kegiatan prioritas dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata

Arah Kebijakan

- Pemulihan pariwisata pengembangan pada 5 destinasi super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang)
- Pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta)
- Pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, kekuatan budaya
- Skema KPBU dalam membangun pusat pusat hiburan seperti *theme park* yang akan menyerap banyak wisatawan

**Alokasi 2021
di Bidang Pariwisata**

Rp14,2 T

Prioritas Pembangunan Pariwisata 2021

(pengembangan sarana dan prasarana pendukung di daerah destinasi wisata)



Belanja K/L

Rp10,0 T

TKDD

Rp4,2 T



Pengembangan
5 Destinasi Super prioritas & 5 Destinasi prioritas



Jembatan
420 m



Pembangunan Pelabuhan
3 Lokasi



Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis
1 unit



Pembangunan Jalan
21,7 km



Promosi Investasi Pariwisata
6 event



Pembangunan Jalur KA
2 Lokasi



Pengembangan Desa Wisata
50 desa



Pengembangan Bandara
1 lokasi

Informasi APBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Hankam dan Hukum

Dukungan atas lembaga hankam dan penegak Hukum diberikan untuk peningkatan stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi



Kemenhan

Rp137,3 T

Pemenuhan, modernisasi, dan perawatan alutsista
Memelihara kestabilan pertahanan mendorong pemulihan ekonomi



Kejaksaan

Rp9,6 T

Penanganan/penyelesaian pemulihan aset terkait tindak pidana
pembangunan ruang pemantauan serangan siber,
dan pusat data SOC (Secure Online Communication)



Polri

Rp112,1 T

Memperkuat stabilitas Polhukhankam
mendorong pemulihan ekonomi
Modernisasi almatsus
Profesionalisme SDM



Mahkamah Agung

Rp11,2 T

Peningkatan fungsi SPPT TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) di 283 pengadilan
Pengembangan prosedur beracara elektronik di pengadilan (e-court)



KPK

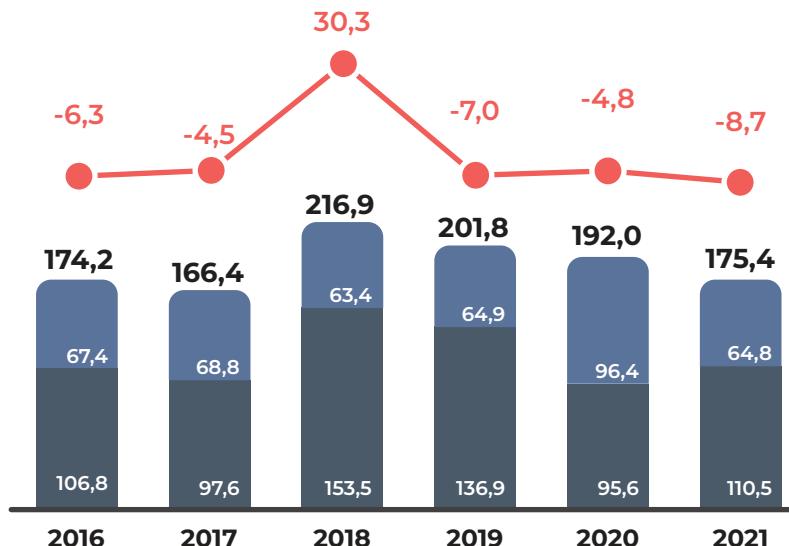
Rp1,3 T

monitoring implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Pidana Korupsi mendukung SPPT-TI
Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi



Alokasi Subsidi

diarahkan untuk lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan mendukung UMKM dan Koperasi



Subsidi Energi

Subsidi tetap solar Rp500/lt (2020: Rp1.000/lt)

Subsidi listrik Rumah Tangga
diberikan kepada RT daya 450 VA dan 900 VA sesuai data DTKS

Volume Subsidi Energi:
LPG 3 Kg → 7,5 juta MT
Solar → 15,8 juta kiloliter
Minyak tanah → 0,5 juta kiloliter

Pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan Bansos secara bertahap dan berhati-hati.

Subsidi Nonenergi

Penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*).

Efisiensi HPP dan perubahan komposisi pupuk NPK sebagai langkah efisiensi anggaran.

Insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP)

Plafon KUR naik dari Rp190 T (2020) menjadi Rp220 T (2021)

Mendukung peningkatan pelayanan umum bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik

Subsidi Pupuk
8,2 juta ton

PSO PT Pelni
4,5 juta penumpang

Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
157,5 ribu unit

PSO PT KAI
402,5 juta penumpang

Subsidi Bunga KUR
29,9 juta debitur (akumulasi)



Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peningkatan *quality control* TKDD dan mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

TKDD, 2016-2021

(triliun rupiah)

- Transfer ke Daerah
- Dana Desa
- Pertumbuhan (persen)

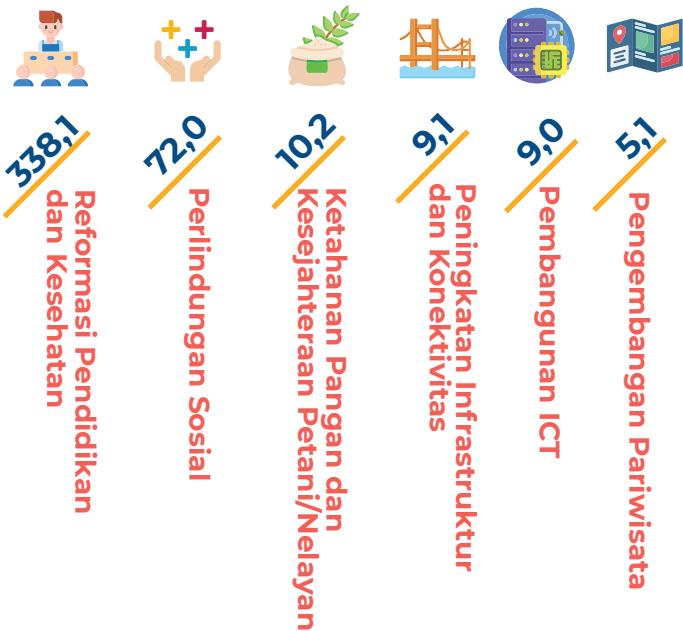


Arah Kebijakan

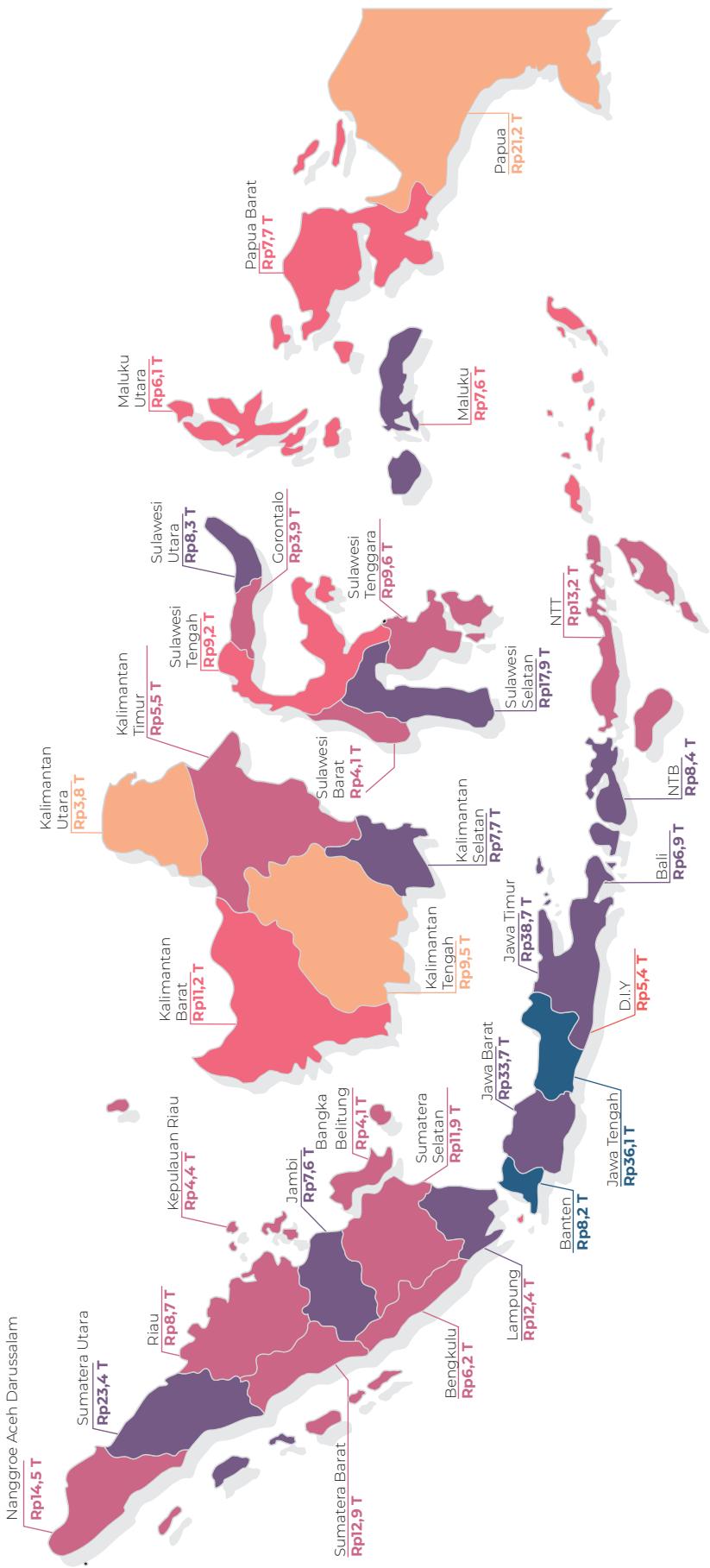
- Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui:
 - Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
 - Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
- Mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan).
- Mendorong belanja Infrastruktur daerah melalui *creative financing* seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
- Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
- Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Dukungan Program Prioritas

(triliun rupiah)



Dana Alokasi Umum Rp390,3 T



Transfer ke Daerah

Peningkatan *quality control* TKDD dan mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Rencana Pencapaian DAK Fisik

*Angka target sasaran DAK Fisik masih sementara



Pendidikan

- Peningkatan sarana dan prasarana **23.016 satuan pendidikan**
- Pembangunan **34 unit** dan Rehabilitasi **36 unit** Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum



Lingkungan Hidup

- Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah **17 unit**
- Pengadaan Kontainer Sampah **348 unit**



Pariwisata

- Pembangunan amanitas kawasan pariwisata dan pembangunan atraksi daya tarik wisata di **154 daerah**



Jalan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan **2.375 km**
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan **10.076 km**
- Pelebaran Jalan **229 km**
- Pembangunan Jembatan **699 m**



Kelautan & Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengadaan Sarpras Pelabuhan Perikanan di **111 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan Prov/Kab/Kota **255 unit**



Irigasi

- Rehabilitasi jaringan irigasi **335.584 ha**
- Pembangunan jaringan irigasi **41.488 ha**



Transportasi Perdesaan

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan desa strategis **1.769 km**
- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan sebanyak **585 unit**



Kesehatan & KB

- Pembangunan **971 gedung Puskesmas**
- Pembangunan/Rehabilitasi **559 RS Rujukan**
- Penguatan Intervensi *stunting* di **360 kab/kota**



Transportasi Laut

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **80 Pelabuhan**



Air Minum

- Pembangunan SPAM JP **167.110 SR**
- Perluasan SPAM JP **117.097 SR**



Sanitasi

- Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat **33.975 SR** skala Permukiman dan **465 SR** skala Perkotaan



Perumahan dan Permukiman

- Penyediaan Perumahan di permukiman kumuh **50.000 unit**
- Penanganan Rumah kumuh terintegrasi **1.000 unit**



IKM

- Pembangunan Sentra IKM **20 sentra**
- Revitalisasi Sentra IKM **100 sentra**



Pertanian

- Pembangunan **3.355 unit** sumber air
- Pembangunan **1.000 km** jalan usaha tani/jalan produksi

Transfer ke Daerah

Peningkatan *quality control* TKDD dan mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Rencana Pencapaian DAK Nonfisik



Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

218 ribu sekolah dan 44,7 juta siswa



BOK dan BOKB

10.143 puskesmas dan 5.889 balai penyuluhan KB



BOP PAUD

6,7 juta peserta didik



Dana PK2UKM

57.026 peserta pelatihan dan 863 pendamping



Tunjangan Profesi Guru PNSD

1,09 juta guru



Dana Administrasi Pelayanan Kependudukan

33 Provinsi dan 508 Kab/Kota



Tambahan Penghasilan Guru PNSD

124,7 ribu guru



Dana Pelayanan Kepariwisataan

44.320 peserta pelatihan dan 50 TIC



Tunjangan Khusus Guru PNSD

34,6 ribu guru



Dana Bantuan BLPS

1 pemerintah daerah



BOP Pendidikan Kesetaraan

719,5 ribu peserta didik



Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan-Anak

34 Provinsi dan 216 Kab/Kota



BOP Museum dan Taman Budaya

113 museum dan 19 taman budaya



Dana Fasilitasi Penanaman Modal

111,6 ribu peserta pelaku usaha



Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.300 kelompok masyarakat



Dana Desa

Meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas



Arah Kebijakan

Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

- Meningkatkan porsi alokasi formula, guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desa.
- Penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa.

Fokus untuk Pemulihan Perekonomian Desa

- Memperkuat kesinambungan program padat karya tunai.
- Memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian.
- Mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital

Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas

- Mendukung program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital.
- Mendukung program pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata.
- Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.

Capaian Pemanfaatan Dana Desa 2015-2019

source: sipede.pppmd.kemendes.go.id

Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Jalan	Jembatan	Pasar Desa	BUMDes	Tambatan Perahu	Embung	Irigasi	Sarana Olahraga
231.709 km	1.327.069 m	10.480 unit	39.226 kegiatan	6.312 unit	4.859 unit	65.626 unit	25.022 unit

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

PAUD 59.640 kegiatan	Drianase 36.184.121 m	Puskesmas 30.127 unit	Sumur 58.259 unit	Penahan Tanah 215.989 unit	Air Bersih 99.3764 unit	MCK 339.909 unit	Polindes 11.599 unit

Informasi APBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

APBN 2021

Defisit

5,70% thd PDB
(2020: 6,34%)

**Pembiayaan
Anggaran**

Rp1.006,4 T
(2020: Rp1.039,2 T)

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 5,70% terhadap PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal

Defisit & Pembiayaan Anggaran

Arah kebijakan pembiayaan akan mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional

Defisit APBN Tahun 2021 berada pada level 5,70% PDB

Pada tahun 2021 ditempuh kebijakan fiskal yang ekspansif-konsolidatif dalam rangka mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel, prudent, dan sustainable.



Pembiayaan Anggaran 2021

(triliun Rupiah)

	2020	2021 APBN
► Pembiayaan Utang	1.220,5	1.177,4
▶ SBN (neto)	1.173,7	1.207,3
▶ Pinjaman (neto)	46,7	(29,9)
► Pembiayaan Investasi	(257,1)	(184,5)
► Pemberian Pinjaman	5,8	0,4
► Kewajiban Penjaminan	(0,6)	(2,7)
► Pembiayaan Lainnya	70,6	15,8
JUMLAH	1.039,2	1.006,4

Kebijakan

Pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif

untuk mendukung *countercyclical* dalam rangka stabilisasi ekonomi (antara lain penguatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU), *Sovereign Wealth Fund/SWF*, Saldo Anggaran Lebih/SAL, dan Badan Layanan Umum/BLU

Mendukung restrukturisasi BUMN dan BLU

Special Mission Vehicle untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target

Mendorong Pendalaman Pasar dan Efisiensi Cost of Borrowing

Perluasan basis investor/kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah

Mendorong Efektivitas Quasi Fiscal

untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM dan peningkatan ekspor

Saldo Anggaran Lebih (SAL)

untuk mengantisipasi ketidakpastian

Meningkatkan Akses Pembiayaan

untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/KUMKM, Ultra Mikro/UMi, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)



Pembiayaan Utang

Selain untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban pinjaman

Kebijakan Pembiayaan Utang

- ✓ Utang sebagai instrumen untuk mendukung *countercyclical* dalam rangka akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dan reformasi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal
- ✓ Menjaga efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar (perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, diversifikasi pembiayaan utang a.l. penerbitan SDG Bonds, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah)
- ✓ Menjaga keseimbangan makro dan keseimbangan biaya dan risiko melalui komposisi portofolio utang yang optimal

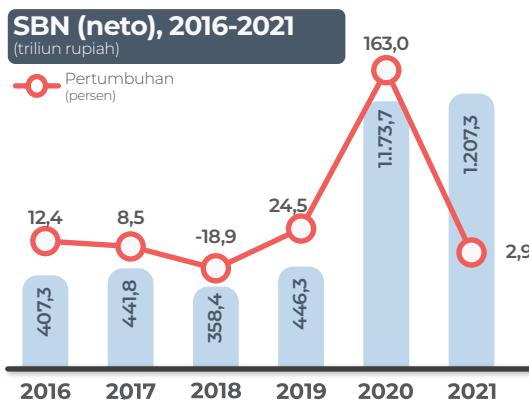
Pembiayaan Utang, 2016-2021



Rencana Pemenuhan Pembiayaan Utang Tahun 2021

- ✓ Penerbitan SBN tetap dominan dalam mata uang rupiah, dengan tenor menengah-panjang
- ✓ Optimalisasi lelang SBN dengan mempertimbangkan partisipasi BI melalui lelang regular, *green shoe option* dan *private placement*

- ✓ Pengadaan utang tunai valas termasuk pinjaman program dengan memanfaatkan fleksibilitas antarinstrumen utang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan
- ✓ Penerbitan SBN ritel dengan inovasi produk dan strategi pemasaran sebagai upaya financial deepening tetap dilakukan mempertimbangkan minat investor domestik



Yield SBN, 2015-2020



Informasi APBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi ditujukan antara lain untuk *refocusing* pembiayaan, penguatan *quasi fiscal*, dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi UMKM, UMi, dan pembiayaan rumah bagi MBR

Kebijakan Pembiayaan Investasi 2021



SDM yang Berkualitas

- ▶ Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
- ▶ Menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi.

Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan Rp66,4 T

- ▶ LPDP Rp20,0T
- ▶ Dana Abadi Penelitian Rp3,0T
- ▶ Dana Abadi Kebudayaan Rp2,0T
- ▶ Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp4,0T
- ▶ Pembiayaan Pendidikan Rp37,4 T

02

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

- ▶ Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor
- ▶ Pembangunan infrastruktur sarpras transportasi, pemukiman, sumber daya air, dan infrastruktur ketahanan energi

Anggaran Infrastruktur Melalui Pembiayaan Investasi Rp45,1 T:

- ▶ PT PLN Rp5 T
- ▶ PT HK Rp6,2 T
- ▶ PT SMF Rp2,25T
- ▶ PT PAL Rp1,3T
- ▶ Pelindo III Rp1,2T
- ▶ BLU PPDPP Rp16,6 T
- ▶ BLU LMAN 11,1 T
- ▶ ITDC Rp0,47 T
- ▶ PT KIW 0,977 T

03 Mendorong Program Ekspor Nasional

- ▶ Mendukung industri barang/jasa yang berorientasi ekspor
- ▶ Penguatan daya saing barang/jasa dalam negeri di pasar internasional

Anggaran Program Ekspor Nasional Rp5,0 T untuk LPEI

04 Penguatan Kelembagaan UMKM, UMi, Asuransi & Penjaminan

- ▶ Pengembangan dan pemberdayaan UMKM sektor UMi
- ▶ Peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran
- ▶ Memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perseroan

Dukungan Kelembagaan & Pemberdayaan Rp22 T

- ▶ PT BPUI Rp20,0 T
- ▶ BLU PIP Rp2,0 T

05

Meningkatkan Peran Serta Indonesia di Dunia Internasional

Mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional

Anggaran Peran serta Indonesia di Dunia Internasional Rp2,9 T

- ▶ BLU LDKPI Rp2,0 T
- ▶ Investasi pada LKI Rp0,9 T

Target Manfaat Investasi Pemerintah Tahun 2021



BLU PPDPP & PT SMF

157,5 ribu unit

rumah bagi MBR melalui program KPR FLPP



BLU LMAN

Pendanaan pengadaan tanah

untuk 43 Proyek Strategis Nasional



PT Hutama Karya

49 km Jalan Tol Lintas Sumatra

(Ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Lubuk Linggau-Bengkulu, Sigli-Banda)



PT PAL Indonesia

Mendukung kesiapan fasilitas

produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam



PT KIW

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang



PT PLN Pendanaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

untuk Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi untuk Listrik Pedesaan

LPEI

Penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi serta Penugasan Khusus Ekspor (National Interest Account)



BLU PIP

Pembiayaan bagi **850 ribu debitur** pelaku usaha ultra mikro



PT ITDC

Pembangunan destinasi pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo serta fasilitas pendukung untuk Penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo



PT PELINDO

Pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub



LPDP

Membayai 4.000 beasiswa mahasiswa baru, 12.000 mahasiswa ongoing, 75 proposal riset baru, dan 189 riset ongoing



hai!

kami butuh masukan anda

Tahukah anda? Hasil penilaian Open Budget Survey (OBS) tahun 2019, Indonesia mendapat peringkat 18 dari 117 negara di dunia. OBS diselenggarakan oleh International Budget Partnership yang fokus pada transparansi anggaran.

Buku Informasi APBN adalah salah satu indikator dari penilaian survei tersebut. Oleh karena itu, sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Buku Informasi APBN selanjutnya, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi survei pada tautan di bawah.

scan di sini



bit.ly/surveiinformasiAPBN2021



terima kasih...

Partisipasi anda sangat berarti.

Kami berkomitmen dalam transparansi anggaran ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban #UangKita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Jalan Dr. Wahidin No.1
Gedung Sutikno Slamet Lt.12
www.anggaran.kemenkeu.go.id

